

Ikhtisar Webinar

Proyeksi Tantangan Komoditas Strategis Minyak Bumi dan Batu Bara di Indonesia



Proyeksi Tantangan Komoditas Strategi Minyak Bumi dan Batu Bara di Indonesia

3 Februari 2023 | 14.00 – 16.30 WIB

Webinar Proyeksi Tantangan Komoditas Strategi Minyak Bumi dan Batu Bara di Indonesia dibuka oleh Makmur Keliat, Penasihat Senior LAB 45. Webinar ini menghadirkan empat pembicara yakni: (1) Dendi Ramdani, *Vice President* Riset Industri dan Regional Bank Mandiri; (2) Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional; (3) Hery Haerudin, *Vice President* Pertamina Energy Institute PT. Pertamina (Persero); (4) Irsyan Maududy, Tim Kolaborasi Riset Cakrawala Startegis Minyak Bumi dan Batubara LAB 45; serta dimoderatori oleh Fariz Raffandi Marzuki, Analis Kebijakan Ekonomi Politik LAB 45.

Makmur Keliat memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa terdapat dua peristiwa besar yang dapat dilihat pada tahun 2022, yakni adanya peningkatan harga batubara sebagai konsekuensi dari masalah geopolitik serta dampak karena adanya pandemi *Covid-19*. Disrupsi kemudian dapat dikatakan terjadi sebanyak dua kali, yakni disrupsi terkait masalah kesehatan atau pandemi dengan disrupsi masalah perang antara Rusia dan Ukraina. Di luar dua peristiwa ini terdapat juga kebijakan dari China untuk tidak lagi memberikan ruang investasi baru pada sektor batubara. Sejumlah peristiwa ini tentu saja mempengaruhi Indonesia dalam hal mengaitkan kebutuhan energi Indonesia dengan kebijakan fiskal misalkan dampak naik turunnya harga bahan bakar minyak terhadap ketahanan fiskal. Kebijakan energi juga tidak lagi dapat memberikan ruang yang utuh atau otonom terhadap Indonesia karena adanya keterikatan-keterikatan dengan norma-norma internasional. Seperti halnya upaya untuk menghabiskan penggunaan bahan bakar karbon menjadi bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan serta upaya *energy mix* yang harus dilakukan dan disepakati di tingkat internasional. Kajian lebih lanjut mengenai hal ini akan sangat penting terutama dalam upaya mendapatkan perspektif yang seimbang dan utuh untuk melihat konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dalam mempertahankan kesinambungan dan ketahanan ekonomi nasional.

Hadir sebagai pembicara pertama Bapak Dendi Ramdani, *Vice President* Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, menyampaikan bahwa adanya ekspektasi resesi global dan kebijakan kontraksi moneter membuat harga komoditas ke depan akan terkoreksi karena koreksi harga yang *overshoot*. Salah satu yang membuat harga komoditas terkoreksi ialah peningkatan produksi minyak Rusia yang perlahan pulih. Tantangan yang dihadapi dalam transisi energi menuju energi yang *renewable* ialah harga energi *renewable* yang relatif mahal termasuk biaya

operasional dan investasi yang dipengaruhi oleh teknologi saat ini. Dalam jangka panjang, komoditas batubara akan menghadapi persaingan dengan energi baru terbarukan, tetapi diperkirakan permintaan batu bara global masih akan meningkat hingga tahun 2024. Kebijakan China terhadap penggunaan batu bara kemudian akan mempengaruhi pergerakan harga batu bara ke depan mengingat bahwa China sebagai negara produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia. Meskipun target produksi batu bara Indonesia tahun 2022 melebihi target, produksi batu bara ke depan akan menghadapi resiko berkaitan dengan ketidakpastian cuaca, peraturan pemerintah, serta realisasi DMO yang belum optimal sehingga industri batubara akan rentan terhadap perubahan peraturan yang ditujukan untuk mendorong pemenuhan DMO. Di sisi lain, ke depan, pembangkit berbasis batu bara relatif akan mendominasi bauran energi pembangkit listrik Indonesia. Selain itu, prospek dari program pemerintah yakni hilirisasi batu bara ternyata menemui tantangan tersendiri dengan tingginya pergerakan harga batu bara. Untuk investasi sektor migas, baik hulu maupun hilir masih jauh dari target yang salah satunya disebabkan oleh sentimen investor global terhadap perencanaan industri migas domestik. Defisit perdagangan minyak mentah juga semakin dalam seiring dengan meningkatnya harga komoditas energi. Namun begitu, dalam jangka panjang, Indonesia masih berpeluang untuk mengembangkan industri hulu migas karena memiliki *recoverable reserve* minyak dan gas terbesar di ASEAN yakni terlihat dari total cadangan minyak dan gas Indonesia yang mencapai angka 26.200 MMBOE. Tantangan eksplorasi dan eksploitasi Hulu Migas Indonesia ke depan akan berkaitan dengan jangka waktu monetisasi aset yang semakin panjang serta peralihan wilayah operasi dari darat ke lepas pantai dan dari bagian barat Indonesia ke timur Indonesia.

Pada sesi pembicara kedua, pembahasan berfokus pada tantangan komoditas batubara dan juga upaya mengurangi karbon emisi. Pembicara kedua, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, menyampaikan bahwa di dalam PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) terdapat target untuk menghentikan ekspor batu bara pada tahun 2046 sehingga penggunaan batubara kemudian akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri. Selain itu, pemanfaatan batubara akan secara bertahap diturunkan sehingga target pemanfaatan batubara pada 2025 adalah 30 persen dan pemanfaatan EBT sebesar 23 persen. Pemanfaatan EBT di Indonesia dari tahun ke tahun sebetulnya sudah menunjukkan tren peningkatan dan mencapai angka 12,16 persen pada tahun 2021. Produksi batubara pada tahun 2022 mencapai jumlah 687 juta ton atau 104% dari target sejumlah 663 juta ton, sedangkan proyeksi perdagangan batubara di dunia, menunjukkan bahwa, penurunan permintaan di negara maju dan China akan mengurangi

volume perdagangan batubara sebesar 25% hingga 2030 dan 60% hingga 2050 dari level 2021. *Road map* pengembangan dan pemanfaatan batubara hingga tahun 2025 akan berfokus pada studi penerapan teknologi batubara bersih (CCT) dan dilanjutkan dengan fokus persiapan implementasi dari teknologi batubara bersih hingga tahun 2030. Hal ini sejalan dengan strategi hilir pemanfaatan batubara di Indonesia, bahwa ke depan, pemanfaatan akan diarahkan kepada pengeloaan batubara yang disertai teknologi batubara bersih (CCS/CCUS&IGCC) pada PLTU dan industri PNT batubara serta pelaksanaan *co-firing* biomassa. Seiring penurunan volume perdagangan batubara global dan investasi di industri batubara, pengembangan dan pemanfaatan batubara Indonesia kemudian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan optimalisasi pemanfaatan batubara di dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Diperkirakan porsi batubara dalam bauran energi primer adalah sekitar 21% pada tahun 2060, menurun dari 36-37% pada tahun 2025. Peta jalan transisi energi memiliki tujuan dalam memberikan masukan pembaharuan KEN dan RUEN untuk keselarasan dengan strategi dan arah kebijakan perubahan iklim serta pelaksanaan transisi energi di Indonesia akan mencakup gabungan pengeloaan energi fosil dengan teknologi bersih, percepatan pengembangan EBT dengan kendaraan listrik baterai hidrogen, serta *smart grid*, *smart energy* dengan konservasi energi.

Pada sesi pembicara ketiga berfokus terkait proyeksi tantangan sektor minyak bumi di Indonesia terhadap Indonesia dan Internasional, Hery Haerudin, *Vice President* Pertamina Energy Institute PT. Pertamina (Persero), menyampaikan bahwa dalam neraca perdagangan, minyak dan gas nasional berkontribusi pada defisit neraca perdagangan Indonesia, penyebab defisit ini bersumber dari impor minyak dan produk minyak. Sementara dari gas tampaknya masih berkontribusi positif. Dinamika yang berdampak pada sektor migas saat ini mencakup tiga hal, yakni: *climate crisis*, *conflict*, dan *Covid-19*. Komitmen dunia dalam mengatasi perubahan iklim kemudian meningkatkan tekanan pada sektor migas secara global. Padahal, di satu sisi, permintaan minyak dunia masih cukup kuat dan diperkirakan meningkat. Hal ini kemudian meningkatkan risiko volatilitas harga ke depan. Saat ini, Tiongkok dan kebijakan *Covid*-nya juga menjadi sumber *swing supply-demand global*, yang kemudian berdampak pada harga minyak mentah. Harga minyak mentah yang sebelumnya telah mengalami peningkatan tajam, saat ini mengalami *downtrend* karena adanya kekhawatiran resesi global, dan telah relatif stabil di kisaran >USD85/bbls pada saat ini. Pada tahun 2023, diperkirakan *demand* akan relatif stabil karena tekanan makroekonomi. *Inventory* minyak dan produk diperkirakan juga meningkat karena pelemahan permintaan serta *OPEC spare capacity* yang diperkirakan juga akan meningkat pada 2023. Pada sektor minyak nasional, diperkirakan

permintaan minyak ke depan akan menurun di skenario *Market Driven* dan *Green Transition* karena adanya transisi energi, misalnya elektrifikasi kendaraan dan *blending biofuel* pada transportasi darat, mengingat saat ini permintaan minyak nasional didominasi oleh sektor transportasi atau pada sektor rumah tangga (residensial) melalui konversi LPG ke kompor induksi dan jaringan gas. Secara geopolitik, *price cap coalition* yang berkepanjangan selanjutnya akan mendorong negara-negara penghasil minyak terlibat dalam persaingan AS-China, dengan mempertimbangkan keuntungan untuk bergabung dalam blok ekonomi-politik sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pasar minyak yang tidak stabil juga menjadi bencana bagi ekonomi global, dengan turunnya pasokan minyak global yang akan mendorong harga energi lebih tinggi dan memicu inflasi.

Sesi pembicara terakhir, diisi oleh Irsyan Maududy, Tim Kolaborasi Riset Cakrawala Startegis Minyak Bumi dan Batubara LAB 45, menyampaikan bahwa adanya *Oil Price Cap G7* sebagai *economic sanction* dan upaya negara-negara G7 serta Uni Eropa mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan untuk membiayai perang akan berdampak kepada Indonesia secara tidak langsung, yakni dari sisi harga dan pasokan minyak dunia. Negara G7 dan Uni Eropa secara data menguasai 52 persen kepemilikan armada kapal, sehingga upaya ini akan menutup akses terhadap lebih dari 50 persen armada kapal yang kemudian tidak dapat digunakan untuk membeli minyak dari Rusia. Namun, meskipun ekspor minyak Rusia turun di negara G7 dan Uni Eropa, tetapi harga minyak Rusia yang kemudian dijual sangat murah ternyata dimanfaatkan oleh negara-negara seperti India dan Tiongkok dan berimplikasi pada pengaruh pembatasan terhadap pendapatan pemerintah Rusia yang akan minim. Jika Rusia tidak melakukan *counter policy*, akan membuat penurunan harga minyak global, dan selanjutnya diikuti penurunannya ICP. Efek penurunan ini kemudian akan positif terhadap APBN di Indonesia. Posisi internasional dan Indonesia terhadap adanya pembatasan harga ini cenderung berdampak negatif terhadap tensi geopolitik yang semakin parah serta memiliki dampak terhadap ekonomi internasional. Rekomendasi bagi Indonesia yang diusulkan ialah bersikap netral dengan tidak membeli minyak murah Rusia karena aspek politik internasional yang dianut Indonesia.

Selain itu, pembahasan sesi ini juga berkenaan dengan adanya komitmen Tiongkok untuk beralih ke proses transisi menuju energi rendah karbon yakni kebijakan pemberhentian investasi Tiongkok terhadap sektor batu bara yang ternyata memberi kejutan bagi industri batubara untuk melakukan pencarian sumber pendanaan baru. Dampak yang terjadi dalam jangka pendek sebetulnya tidak menimbulkan kerugian yang berat karena perbankan

tampaknya masih dapat menjadi substitusi pendanaan dengan didukung oleh tingginya nilai ekonomi sektor batu bara serta aktivitas PLN yang dapat memanfaatkan PLTU *existing*. Namun, dalam jangka panjang, pendanaan sektor ini di lembaga keuangan akan mengalami tantangan. Misalkan BNI dan BRI yang berkomitmen tidak akan melakukan ekspansi kredit batubara, OJK yang menerbitkan *green taxonomy* mengenai pembatasan pembiayaan terhadap *brown sector*, serta terbitnya UU P2SK. Di sisi lain, sebenarnya hal ini tentu akan berdampak positif pada komitmen mengenai transisi energi hijau pada pembangkit tenaga listrik di Indonesia Untuk pelaksanaan *coal phase out* di Indonesia, mengalami tantangan bahwa rata-rata usia PLTU di Indonesia masih relatif muda, sehingga akan tetap membutuhkan biaya yang besar dan perlu memanfaatkan peluang dari pendanaan luar negeri yang mendukung *cool phase down*. Rencana pensiun dini PLTU dan pengembangan EBT juga harus dilakukan secara paralel dengan tetap memperhatikan kondisi pasokan listrik agar masalah *oversupply* listrik dapat tertangani. Rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan sektor batubara dalam jangka pendek yang diusulkan yakni melalui pembentukan BLU, kebijakan pelaporan DMO per bulan, serta pemetaan terhadap penambang dan PLTU yang menerima pendanaan dari Tiongkok sebelumnya. Sedangkan pada jangka panjang, disulkan dengan menjajaki Kerjasama Tiongkok agar menjadi investor bagi Indonesia untuk mencari lebih banyak modal dalam percepatan transisi energi dan *coal phase down* serta dengan pembentukan BLU pengelolaan dana dari PNBP batu bara untuk pendanaan transisi energi.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Bagaimana *financing* untuk minyak bumi dan batubara pada saat ini beradaptasi terhadap standar *environmental social & government (ESG)*?

Dendi Ramdani: Untuk minyak bumi tidak terlalu *issue* terkait hal ini, mungkin yang lebih ditekankan di batubara. Terkait ESG, terdapat standar regulasi atau aturan yang memang harus dipatuhi dan ada yang di luar regulasi, artinya memang tidak diatur atau belum diatur. Bank pasti akan meminta supaya standar-standar yang sesuai dengan aturan undang-undang atau aturan formal harus diikuti. Terdapat beberapa yang tidak diatur terkait misalkan besarnya karbon, atau sebetulnya peraturan yang sudah ada tetapi belum di *enforce* seperti *carbon tax*. Standar-standar itu yang belum diatur secara umum sebetulnya sudah ada upaya tekanan ke arah sana, misalkan pertanyaan yang diajukan ke Bank Mandiri terkait kapan waktu meninggalkan *financing* di batubara. Tetapi, jika dilihat dari realita, kita sendiri masih membutuhkan batubara di Indonesia ini, Jadi, tidak serta merta akan keluar dan saya pikir hal itu akan membuat *collapse* di perekonomian Indonesia. Sekali lagi, hal-hal seperti ini

sebetulnya *must to discuss*. Kalau hal itu diimplementasikan secara total tentu kita harus melihat realita, tetapi yang penting dari sisi regulasi tentu harus *comply* semuanya, akan ada pertimbangan-pertimbangan, misalkan jika nanti akan ada penerapan *carbon tax*, saya pikir itu menjadi satu hal yang sangat baik untuk bisa menetralsisir terkait dengan upaya untuk mengurangi karbon ini. Untuk PLTU rasanya akan dikurangi atau bahkan dipensiunkan, dari sisi bank prinsipnya sebenarnya akan mengikuti saja mengenai aturan.

Hery Haerudin: ESG sebetulnya adalah *voluntarily* dan banyak sekali lembaga-lembaga penilai yang memberikan *assessment* dan *ranking* terkait ESG ini. Jika dilihat dari yang sudah ada, bisa saja di suatu tempat dia mendapatkan *rank* yang paling tinggi, tetapi di tempat lain ternyata dia mendapat *rank* menengah atau di bawah. Jadi kembali lagi ini adalah sejauh mana kebutuhan perusahaan untuk memperbaiki hasil-hasil yang terkait dengan ESG. Untuk pembiayaan sendiri, memang terdapat indikasi untuk mungkin bisa mendapatkan pembiayaan -pembiayaan yang lebih murah, tetapi kalau dari sisi investor sendiri, ternyata mereka memilih investasinya juga tidak selalu yang ESG nya tinggi, Karena bagi mereka, investasi yang penting ialah menghasilkan *return* yang tinggi, sehingga tergantung kembali ke *project* itu sendiri, sejauh mana *project* akan berjalan baik dan menguntungkan. Kami sebagai perusahaan juga perlu tetap komitmen untuk terus memperbaiki kinerja kami dari sisi lingkungan, *governance*, dan sosialnya.

Pertanyaan: Bagaimana rencana penutupan tambang dan reboisasi ini sangat optimal? Bagaimana cara Dewan Energi Nasional menyikapi tantangan pendanaan terkait *co-firing* dalam upaya pengurangan emisi karbon?

Djoko Siswanto: Roadmap *phase out* pembangkit listrik batubara disesuaikan dengan berakhirnya kontrak, apabila kontrak sudah habis, maka tidak diperpanjang. Semakin tua, efisiensinya juga semakin berkurang, sedangkan pembangkit-pembangkit batubara yang baru akan membutuhkan waktu. *Co-firing* tentunya akan memerlukan dana, kebijakan kami ialah bahwa selama biomassa harganya tidak lebih mahal dari batubara, maka akan langsung diserap 100 persen oleh kami. Tetapi, problemnya adalah produsen biomassa yang lebih menyukai ekspor disebabkan oleh harganya yang akan lebih mahal. Oleh karena itu, hal ini menjadi kendala bagi kita dalam meningkatkan pemanfaatan EBT dan mengurangi batubara. Strategi kami dalam melakukan pendanaan misalnya pernah dilakukan dalam G20 di Indonesia kemarin, yakni diadakan rapat pendanaan 20 Billion USD untuk pengembangan EBT, khususnya untuk menuju *net zero emission*. Pendanaan ini tidak hanya untuk pengembangan pembangkit EBT, tetapi juga untuk pengembangan CCS/CCUS atau peningkatan studi-studi mengenai pemanfaatan hidrogen, amonia, nuklir, dan lainnya. Kami

juga telah melakukan MoU dengan Bank BRI dan Bank Mandiri untuk pembiayaan pemasangan PLTS Atap untuk jangka panjang dengan skema tanpa uang muka. Dirjen EBTKE juga berhasil mendapatkan dana hibah bagi orang yang akan memasang PLTS atap secara gratis dengan bentuk *voucher*. Beberapa yang telah dilakukan lainnya termasuk kerjasama pendanaan dengan Pemerintah Denmark berkaitan kajian-kajian dan survei yang *pilot project* nya dilakukan di Lombok dan saat ini juga sudah mulai berjalan di tiga provinsi di Indonesia. Upaya-upaya ini kami lakukan dengan alasan, tanpa adanya bantuan internasional, sepertinya akan sulit mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 karena biayanya yang besar mencapai ribuan triliun dan tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan APBN.

Pertanyaan: Bagaimana implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat diterapkan, mempertimbangkan sikap Indonesia pada politik internasional serta bagaimana dampak intervensi tadi terhadap kapasitas fiskal yang akan kembali mengikuti norma batas 3 persen terhadap PDB?

Irsyan Maududy: Kendalanya cukup sulit karena Indonesia sudah cukup berkomitmen dalam posisi yang tetap dalam gerakan non-blok, termasuk dalam hal ini wacana untuk membeli minyak dari Rusia yang harganya sangat murah dibandingkan dengan harga minyak mentah lainnya, sehingga dirasa tidak mudah jika ibaratnya tidak bersikap netral dalam kasus ini. Untuk pertanyaan kedua, kapasitas fiskal sebetulnya terdapat dua sisi, yakni dari sisi pendapatan dan sisi belanjanya. Pada tahun 2023 dirasa hal yang sangat *possible* apabila kembali mengikuti norma batas 3 persen terhadap PDB karena intervensi dari sisi belanjanya yang bisa ditekan, terlebih pada tahun 2022 juga masih ada sisa pembentukan dana pemulihan ekonomi yang cukup besar dengan melihat perkembangan ekonomi tahun lalu yang cukup baik dan harga komoditas yang tidak *se-windfall* tahun lalu. Jadi, akan dapat dibantu dari sisi belanja selain dari sisi pendapatan. Terlebih, dari sisi pendapatan juga terdapat reformasi perpajakan yakni UU HPP yang bisa dipadatkan dari sisi *tax ratio*-nya.

Pertanyaan: Apakah pilihan PLTU dengan menggunakan *carbon capture storage*(CCS) lebih menguntungkan daripada melakukan *retirement* PLTU?

Djoko Siswanto: Dari sisi efisiensi, karena kita berkomitmen untuk melakukan *retirement* sesuai dengan kontraknya, ini sebetulnya akan lebih murah karena dalam praktiknya tinggal mematikan saja. Sedangkan, untuk CCS merupakan sebuah investasi ke depan dan dapat dikatakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sesuai dengan *roadmap* kita, kita akan tetap menuju ke arah sana, meski belum ada di Indonesia perkembangannya sampai saat ini.

Strategi saat ini adalah melakukan *co-firing* dengan energi biomass atau hidrogen seperti yang sedang diuji coba di dua PLTU di Tanjung Priok. Ke depan, kita akan berkomitmen mengurangi batubara sembari serius mengerjakan meningkatkan EBT berupa biomass, hidrogen, atau ammonia seperti yang disebutkan sebelumnya. Hasilnya sebetulnya sudah tampak, yakni kini sudah terdapat 31 pembangkit batubara yang dilakukan *co-firing* dengan biomass, tetapi untuk perkembangan CCS di Indonesia sampai sekarang belum ada karena terkait biaya. Jika kita melakukan *retirement* terhadap pembangkit tenaga batubara, maka juga perlu tetap memenuhi *demand* dan menjamin kebutuhan *supply* listrik di Indonesia, dengan kata lain harus siap menemukann penggantinya untuk menjamin kebutuhan. Untuk menjamin kebutuhan itulah, sembari kita lakukan dengan *co-firing*.

Pertanyaan: Adanya tuntutan tambahan insentif fiskal untuk sektor fosil khususnya migas, di sisi lain, terdapat pengembangan EBT yang memerlukan insentif yang besar, maka apakah pemberian insentif fiskal untuk sektor fosil masih relevan untuk diberikan?

Hery Haerudin: Apakah masih diperlukan itu tergantung pada perencanaan itu sendiri, sejauh mana kebutuhan dari energi fosil dan diperlukan untuk jangka waktu berapa lama. Jika diperhatikan juga sebetulnya untuk industri pengembangan EBT perlu disiapkan dengan jumlah yang tidak sedikit juga, mengingat Indonesia juga belum dikatakan maju dalam pengembangan industry ini, sehingga perlu dikembangkan ekosistemnya dan diperlukan waktu tentunya.

Irsyan Maududy: Insentif disini mungkin yang dimaksud seperti subsidi untuk solar, BBM, dan minyak. Memang, jika dilihat, pemerintah sendiri memiliki ambisi untuk mengurangi subsidi BBM ditambah karena ada biaya kompensasi ke Pertamina. Namun, memang tidak semudah itu jika serta merta mencabut dan harganya akan melambung tinggi, karena hal ini akan mengancam sisi kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat kelas bawah. Misalkan bila mencabut subsidi solar tentu akan banyak juga nelayan-nelayan yang terkena imbasnya. Dari sisi pemerintah juga pasti memiliki target lain contohnya kemiskinan, bahwa kemiskinan tentunya berpengaruh juga dengan inflasi harga. Terkait sisi insentif fiskal untuk EBT sebenarnya sudah ada sejumlah upaya, seperti kemudahan investor yang ingin masuk ke Indonesia, subsidi untuk mobil listrik, atau keringanan lain yang bersifat non-fiskal. Subsidi EBT ini juga sebetulnya turut sekaligus mengatasi *oversupply* listrik yang ada di PLN karena pengguna listrik yang semakin masif oleh adanya *shifting* dari pengguna minyak.

Pertanyaan: Dapat kita ketahui bersama bahwa harga batubara telah menunjukkan tren yang menurun, terutama dapat dilihat dari krisis energi di Eropa yang tampaknya sudah mulai teratasi. Lantas, apakah fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri dari sisi perbankan?

Dendi Ramdani: Sebetulnya, harga terkoreksi sudah dalam perhitungan perbankan, dalam pembiayaan memang terjadi peningkatan, tetapi bank sebetulnya sudah belajar banyak dari kejadian pada tahun 2015-2016. Jadi, meskipun harga tinggi, bank akan relatif akan konservatif bahwa investasi baru yang menambah kapasitas sebenarnya relatif sedikit sekali di sektor pertambangan. Meskipun harga terkoreksi relative tetapi harga diperkirakan akan masih relatif tinggi dan sudah dalam kalkulasi bank, sehingga dapat dikatakan masih aman. *Psychological price* batubara berada di sekitar 80 atau 70 dan jikalau terkoreksi masih aman dengan angka di atas 100. Dengan sikap yg konservatif, biaya kredit macet relatif akan kecil sehingga adanya koreksi tidak terlalu membuat *shock* di industri perbankan.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Jumat, 03 Februari
2023

➡ +62811452045

➡ lab45@lab45.id

➡ www.lab45.id